



RENJA

TAHUN 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja PD, dilakukanlah pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra PD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri dapat dipastikan berpedoman pada dokumen RPJMD dan Renstra yang telah disusun.

Tahun 2026 sendiri merupakan salah satu bagian awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029. Bertumpu pada Visi Walikota Blitar: **“Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”**; dan Misi Walikota Blitar: (1) Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis; (2) Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera; (3) Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance; (4) Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter; dan (5) Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra PD Tahun 2025-2029. Dokumen Renja PD Tahun 2026 juga disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Penanggulangan Daerah dilakukan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026 serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Seperti dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan Renja di antaranya berpedoman pada RKPD. Disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja PD. Ini artinya, antara Renja PD dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi: penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD; sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja PD. Sehingga, penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 dapat dipastikan berpedoman pada RKPD Kota Blitar Tahun 2026.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra PD

Selain berpedoman pada RKPD, dokumen Renja PD juga berpedoman pada RPJMD dan Renstra PD. Seperti telah diketahui, pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan RKPD. Dengan kata lain, RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman penyusunan RKPD dan Renstra PD.

Renstra PD sendiri merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Seperti disebutkan di dalam salah satu peraturan perundang-undangan, bahwa sasaran Renstra PD dan sasaran Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah.

Dengan demikian, penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, seperti halnya Renstra PD maupun RKPD. Namun, Renja BPBD Provinsi Jawa Timur dijadikan bahan telaahan guna mengetahui dan menganalisa sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026.

1.1.4. Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026. RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 sendiri menjadi salah satu dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Blitar yang kemudian disahkan menjadi dokumen APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Sehingga, Renja

PD dapat disimpulkan sebagai salah satu dokumen penting yang ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025–2029 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah:

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026.
- b) Menjadi sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.
- c) Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026.

BAB II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, capaian target Renstra s.d. tahun 2025, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat/pemangku kepentingan.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.4 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

3.5 Program dan Kegiatan

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang program dan kegiatan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2027.

BAB V: Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan, keselarasan dan kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra PD. Tujuan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai acuannya. Review tersebut kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra PD dijabarkan di dalam tabel sebagai berikut:

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	01	0007	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3800 orang	950 orang	950 orang	950 orang	100%	950 orang	2850 orang	75%
1	05	03	2	01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	2 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	50%
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	02	0020	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	84 kawasan	21 kawasan	21 kawasan	21 kawasan	100 %	21 kawasan	63 kawasan	75 %
1	05	03	2	02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	81 orang	-	27 orang	27 orang	100 %	27 orang	54 orang	66,67 %
1	05	03	2	02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	05	03	2	02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	48 dokumen	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	36 laporan	75 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	24 kawasan	460 (orang)	8 kawasan	8 kawasan	100 %	8 kawasan	16 kawasan	66,67 %
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	210 %	210 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian/bencana	100 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	50 %
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	1553 orang	50 orang	105 orang	210 %	50 orang	1708 orang	854 %
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	04	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100%
1	05	03	2	04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	20 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	100 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)	A (83,70)	A (83,70)	A (84,80)	101,31 %	A (83,71)	A (84,81)	101,31 %
						Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)	A (83,70)	A (83,70)	A (84,80)	101,31 %	A (83,71)	A (84,81)	101,31 %
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84,23)	Baik (86,45)	Baik (84,08)	Baik (85,75)	101,99 %	Baik (84,16)	Baik (85,75)	101,80 %
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48 dokumen	23 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	47 dokumen	97,92 %
1	05	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 laporan	29 laporan	20 laporan	20 laporan	100 %	20 laporan	69 laporan	86,25 %
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	27 org/bln	25 orang/bln	15 orang/bln	60 %	17 orang/bln	59 orang/bln	59 %
1	05	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	10 laporan	5 laporan	5 laporan	100 %	5 laporan	20 laporan	100 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasar an/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasar an/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasar an/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	3 paket	2 paket	2 paket	100 %	2 paket	7 paket	58,33 %
1	05	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100 %	25 orang	75 orang	75 %
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100%	97,14 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	100 %
1	05	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	5 paket	41,67 %
1	05	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	5 paket	41,67 %
1	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 Paket	12 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	14 paket	43,75 %
1	05	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 paket	75 %
1	05	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	96 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100 %	24 dokumen	72 dokumen	75 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	40 laporan	50 laporan	50 laporan	100 %	30 laporan	120 laporan	60 %
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 unit	4 unit	-	-	-	7 unit	11 unit	137,5 %
1	05	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32 unit	20 unit	-	-	-	7 unit	27 unit	84,38 %
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100%	100 %	100 %	83,34 %	83,34 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	144 laporan	36 laporan	24 laporan	24 laporan	100 %	36 laporan	96 laporan	66,67 %
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	52 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100 %	13 laporan	39 laporan	75 %
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100 %	100 %	87,04 %	87,04 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60 unit	16 unit	11 unit	11 unit	100 %	9 unit	36 unit	60 %
1	05	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	20 unit	11 unit	11 unit	100 %	23 unit	54 unit	67,5 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 unit	34 unit	37 unit	37 unit	100 %	37 unit	108 unit	72,97 %
1	05	01	2	09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	2 unit	66,67 %
1	05	01	2	09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	16,67 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan realisasi capaian target Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

I. Sub Kegiatan yang capaiannya memenuhi target diantaranya :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hal ini dikarenakan seluruh pelaksanaan sub kegiatan tersebut di lapangan sesuai dengan yang telah direncanakan.

II. Sub Kegiatan yang capaiannya melebihi target meliputi :

1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Realisasi berupa jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi melebihi target. Dari 200 orang yang ditargetkan pada akhir periode Renstra, terealisasi 1708 orang, karena mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa selimut, Biscuit, makanan siap saji, velbed, Glangsing dan terpal.

2. Pengadaan Mebel

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD baru

Capaian indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah berupa Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target sebesar 101,80 %. Hal ini disebabkan karena Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui kinerja ASN dalam berbagai bentuk fasilitasi mendapat apresiasi positif, sehingga dapat melebihi capaian target IKM.

III. Sub Kegiatan yang capaiannya tidak memenuhi target antara lain :

1. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana)
2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3. Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
8. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
13. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pemeliharaan Mebel
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum terealisasinya target kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan terjadinya penyesuaian-penyesuaian. Selain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku ketika kegiatan tengah berjalan (adanya perubahan indikator yang berpengaruh pada perubahan target kinerja); adanya Kebijakan baru berupa efisiensi anggaran, perubahan aktivitas, lokasi maupun sasaran kegiatan pun terjadi penyesuaian dengan fokus kegiatan di daerah maupun jadwal kegiatan dari kementerian/provinsi.

Capaian indikator program penanggulangan bencana yaitu ; 1) Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih tercapai 97,89% 2) Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori madya tercapai 100% 3) Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana tercapai 87,5% 4) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status tanggap darurat tercapai 100%

Faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya target dikarenakan beberapa indikator program dan kegiatan yang hanya dapat dihitung pada akhir tahun anggaran

Tidak terealisasinya capaian kinerja kegiatan tersebut Implikasinya adalah tidak bisa memenuhi target akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil adalah melakukan koordinasi yang lebih matang dengan para penanggung jawab kegiatan, segenap aparatur dan stakeholder Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar; serta penyesuaian dan perbaikan rencana kegiatan dengan mengurangi target karena harus disesuaikan dengan besaran pagu anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis

pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama dan dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Gambaran kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2026 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai TUSI PD	IKU/SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Daerah	-	0,56	0,58	0,60	0,62	0,40	0,43	0,47	0,41*)	-	-	- Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan kelengkapan dokumen dan pemenuhan bukti dukung - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/Angka Perkiraan</i> - Mulai Tahun 2026 tidak menjadi indikator tujuan
	Indeks Risiko Bencana	-	96,75	91,12	85,98	70,32	96,75	91,12	85,98	70,32*)	68,60	66,97	- Menjadi Indikator tujuan mulai tahun 2026 - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/Angka Perkiraan</i>
2	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah	IKU OPD	0,53	0,55	0,57	0,59	0,40	0,43	0,47	0,41*)	0,42	0,43	- Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan kelengkapan dokumen dan

No	Indikator Kinerja sesuai TUSI PD	IKU/SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
													pemenuhan bukti dukung - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM/IKK	100	100	100	100	100	100	100	52*)	52	52	- Realisasi capaian sesuai target - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM	100	100	100	100	100	100	100	58*)	58	58	- Realisasi capaian sesuai target - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK	-	-	-	-	-	-	100	58*)	58	58	Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SPM/IKK	100	100	100	100	100	100	100	100*)	100	100	- Realisasi capaian sesuai target - Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	IKK	-	-	-	-	-	-	-	100*)	100	100	Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>

No	Indikator Kinerja sesuai TUSI PD	IKU/SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	Persentase penanganan pra bencana	IKK	-	-	-	-	-	-	100	100*)	100	100	Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>
	Persentase penanganan pasca bencana	IKK	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Realisasi baru ada di Tahun 2026
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	IKK	-	-	-	-	-	-	100	100*)	100	100	Realisasi Tahun 2025 merupakan <i>Proyeksi/ Angka Perkiraan</i>

Terdapat perubahan indikator tujuan yang semula indeks ketahanan daerah, mulai tahun 2026 indikator tujuan adalah indeks risiko bencana. Pada indikator IKK terdapat 4 indikator baru dan 1 indikator yang berubah nomenklaturanya.

Secara umum capaian indikator pada SPM/IKK telah mencapai 100%, namun capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2023-2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana serta Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Beberapa faktor yang harus dilakukan di dalam upaya mencapai target, di antaranya: (1) Adanya kebijakan/regulasi/Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana; (2) Kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang berasal dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD); (3) Adanya komitmen dari pemerintah, komunitas, masyarakat dan stakeholder untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana; dan (4) Penyusunan strategi peningkatan kapasitas dan tingkat ketahanan daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayah, antara lain melalui tingkat individu, organisasi dan sistem.

Implikasi yang timbul adalah capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini juga ditunjang dengan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan diambil, seperti: melakukan koordinasi yang lebih matang dengan para penanggung jawab kegiatan, segenap aparatur dan stakeholder Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar; serta penyesuaian dan perbaikan rencana kegiatan dan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Secara umum, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi fase pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk mengetahui sejauh mana Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) menggunakan Aplikasi SuKMa-e Jatim secara online, realtime dan berbasis qrcode kepada pengguna layanan. Pada Triwulan II tahun 2025 Nilai yang diperoleh 89,30 (baik). Hal kritis yang terkait dengan pelayanan adalah belum tersedianya Gudang khusus penyimpanan logistik dan sarana prasarana penanganan bencana.

faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana lintas sektoral dan pemerintah daerah; (2) Tersedianya mekanisme pendanaan yang fleksibel di dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana; (3) Adanya hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan di dalam tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif yang menciptakan motivasi dan etos kerja yang tinggi; (4) Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas kinerja penanggulangan bencana; dan (5) Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Pada sisi lain, beberapa faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui dalam bentuk: (1) Belum memadainya atau adanya keterbatasan jumlah sumberdaya manusia internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (secara kuantitas dan kualitas);

(2) Belum optimalnya sistem peringatan dini; (3) Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dan multihelix ; (4) Penyusunan dan implementasi rencana penanggulangan bencana yang belum optimal (5) Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Faktor penghambat tersebut dapat menimbulkan rendahnya kesiapsiagaan yang mengakibatkan penanganan bencana yang tidak efektif yang berujung pada hilangnya kepercayaan Masyarakat sehingga dapat menghambat pencapaian visi misi kepala daerah .

Tantangan yang dihadapi antara lain (1) Adanya potensi perubahan iklim global yang akan mempengaruhi frekuensi bencana di semua wilayah; (2) Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana; (3) Masih diperlukan peningkatan kualitas respon cepat terhadap bencana ; (4) Masih perlu ditingkatkan ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi kebencanaan; (5) Masih diperlukannya peningkatan kinerja dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana; (6) Masih diperlukan peningkatan fungsi koordinatif dengan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/ perangkat daerah terkait

Adapun Peluang yang ada meliputi (1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tak terduga (BTT); (3) Tersedianya Tim Reaksi Cepat yang mempercepat penyampaian informasi kebencanaan dan mempermudah koordinasi, pendataan kebutuhan serta Langkah penanganan yang tepat saat terjadi bencana. (4) keberadaan kelurahan tangguh bencana (Keltana) dan relawan kebencanaan; (5) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana; (6) Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar perangkat daerah);

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

- 1) Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat akan potensi bencana;
- 2) Minimnya sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- 3) Pentingnya kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- 4) Pentingnya peralatan pendukung dan ketersediaan logistik yang cukup dalam upaya penanganan bencana;
- 5) Pentingnya sistem database kebencanaan berbasis teknologi digital yang dapat diakses setiap saat oleh pemangku kepentingan;
- 6) Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang bersumber dari RKPD Kota Blitar bersifat sebagai pendukung pelaksanaan Renja PD se-Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan dengan lokasi wilayah Kota Blitar.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (85,80) indeks	3.477.365.606	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %	3.492.665.606	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaian Pagu Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	14.230.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	14.560.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.047.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.010.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	3.535.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	3.535.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	1.190.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	1.190.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	3.520.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	3.850.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 dokumen	2.747.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 dokumen	2.785.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 berita acara	1.190.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 berita acara	1.190.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.295.252.958	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.295.252.958	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.293.020.358	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan	2.293.020.358	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	12 laporan	2.232.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	18 laporan	2.232.600	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	2.083.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	2.083.800	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.083.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.083.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	99.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	115.493.310	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	24.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	30.865.800	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	140 orang	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	140 orang	84.627.510	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	201.741.348	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	178.733.138	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.336.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.520.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.825.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	8.765.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	27.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	21.789.700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	26.906.748	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	11.097.238	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen	3.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen	2.754.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	94.602.300	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.614.200	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.563.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	45.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	54.418.800	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	15.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	17 unit	14.585.500	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	30.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	39.833.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	605.057.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	631.372.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	535.057.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	561.372.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	215.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	200.751.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	23.782.600	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	110.186.900	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	18 unit	6.783.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	39 unit	19.998.900	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	25.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor dan Bangunan Lainnya		yang dipelihara/direhabilitasi								
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	40.000.000	
2	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	80 %	948.960.000	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	80 %	933.660.000	
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		
			Persentase penanganan pascabencana	100 %				Persentase penanganan pascabencana	100 %		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80 %	125.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	52 %	125.013.400	Penyesuaian sasaran
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 orang	125.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600 orang	125.013.400	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	424.960.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan Pencegahan	58 %	427.424.700	Penyesuaian sasaran

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 orang	69.960.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 orang	45.068.400	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	78.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	77.981.800	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	25.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	14.686.200	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	1 dokumen	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			paling lama dalam 1 (satu) tahun					sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	55.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	77.688.600	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 kawasan	37.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 kawasan	36.999.700	Penyesuaian sasaran
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	235.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	205.347.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat	2 dokumen	50.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	2 dokumen	8.581.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	30.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	55.097.300	
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 dokumen	30.000.000	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 dokumen	14.824.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	25 orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	25 orang	59.367.150	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	50.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	67.477.550	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	164.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana		Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar	100 %	175.874.900	Indikator menyesuaikan IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang pada lampiran Kepmendagri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	35.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	35.005.100	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 dokumen	29.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 dokumen	37.539.400	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 laporan	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 laporan	20.756.400	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 kegiatan	20.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang Dilegalkan	2 kegiatan	7.574.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	75.000.000	

Dari review terhadap rencana awal RKPD 2026, didapatkanlah hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2026 tetap bertumpu pada 2 program: Program penanggulangan bencana dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Program penanggulangan bencana terdapat 3 indikator yaitu : Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana, Persentase penanganan tanggap darurat bencana, Persentase penanganan pascabencana.
3. Penyesuaian juga terjadi pada alokasi anggaran program penanggulangan bencana, dari Rp 948.960.000,00 pada rencana awal RKPD, menjadi Rp 933.600.000,00 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
4. Sementara, jumlah kegiatan yang diakomodasi program penanggulangan bencana antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan: 4 kegiatan; 18 sub-kegiatan.
5. Penyesuaian lain terlihat pada indikator kinerja kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dari target capaian kedua kegiatan 100% menjadi 52% dan 58% untuk masing-masing kegiatan pelayanan.
6. Terdapat perubahan indikator pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Semula Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana menjadi Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana indikator awal Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana menjadi Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana yang awal nya berindikator sestelah disesuaikan menjadi Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar
7. Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdapat perubahan indikator. Pada rencana awal indikator kinerjanya berupa indeks kepuasan masyarakat, namun pada analisis kebutuhan menjadi persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku
8. Khusus untuk anggaran yang dialokasikan, penyesuaian juga terjadi, dari Rp 3.477.365.606 menjadi Rp 3.492.665.606 setelah dilakukan analisis kebutuhan. Total sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang awalnya 27 menjadi 28
9. Sementara, jumlah kegiatan dan sub-kegiatan juga mengalami penyesuaian; kegiatan bertambah 1 kegiatan, yaitu kegiatan administrasi Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan adanya sub kegiatan baru yaitu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah, serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah. Selain itu terdapat sub kegiatan yang ditiadakan yaitu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditiadakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak saja bersifat *top-down* melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top-down* dan *bottom-up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan PD.

Namun Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Hasil Reses.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja PD di Kota Blitar tidak dapat dilepaskan dari kebijakan nasional. Kebijakan nasional tersebut tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari lima direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak. Program-program itu tersebar dalam seluruh prioritas nasional.

Salah satu prioritas nasional adalah program kedaulatan pangan dan energi, yang mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah. Kemudian, prioritas lainnya yaitu ekonomi yang produktif dan inklusif, termasuk pendidikan dan kesehatan (Makan Bergizi Gratis/MBG, renovasi sekolah, hingga Sekolah Rakyat), serta deregulasi dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi (hilirisasi sumberdaya alam hingga optimalisasi Danantara), adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan (program 3 juta rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih), serta fiskal adaptif dan stabilitas makro-ekonomi.

RKP 2026 sendiri mengusung tema **“Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif”**. Tema ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan arah kebijakan nasional tersebut dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, dapat disimpulkan perangkat daerah ini akan melaksanakan sejumlah tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang tepat, efektif dan efisien; (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; (3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi organisasi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2026-2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
					2023	2024	2025	2026	2027
	Tujuan: Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: - <i>Hazard (Bahaya)</i> : Menggambarkan potensi suatu fenomena alam yang dapat menimbulkan kerusakan, baik dilihat dari seberapa sering (frekuensi), seberapa luas area yang terdampak (spasial), maupun seberapa besar kekuatannya (magnitude). - <i>Vulnerability (Kerentanan)</i> : Menunjukkan tingkat kepekaan Masyarakat atau sistem terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bahaya. Semakin	91,12	85,98	70,32*)	68,60	66,97

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur kapasitas daerah dalam 3 aspek utama: kapasitas,	tinggi kerentanan, semakin besar risiko yang ditimbulkan. - <i>Capacity (Kapasitas)</i> : Menggambarkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, atau masyarakat untuk menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari bencana. Semakin besar kapasitas, semakin kecil Tingkat risiko yang terjadi. Nilai indeks berdasarkan hasil penilaian BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur	0,43	0,47	0,41*)	0,42	0,43

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
					2023	2024	2025	2026	2027
			kerentanan, dan ancaman bencana. Dengan kata lain, IKD membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko. Untuk mengetahui kapasitas suatu daerah, maka perlu dilakukan diskusi grup (FGD) untuk menjawab 284 pertanyaan perangkat penilaian kapasitas daerah yang melibatkan multipihak; 284 pertanyaan tersebut mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas. Setelah melakukan penilaian mandiri, selanjutnya						

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
					2023	2024	2025	2026	2027
			dilakukan verifikasi yang dilakukan BNPB yang difasilitasi BPBD Provinsi Jawa Timur.						
2	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	86,45	85,75	85,75*)	85,80	85,90

*) Realisasi Tahun 2025 merupakan *Proyeksi/Angka Perkiraan*

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VISI: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
MISI: (1) MEWUJUDKAN BLITAR KOTA PANCASILA YANG AMAN, RELIGIUS DAN NASIONALIS				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	1. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas Sumber daya dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim	1. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		2. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui penyediaan sistem peringatan dini	2. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (EWS) di Kawasan rawan bencana	
		3. Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana	3. Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana	

		4. Peningkatan Peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dalam upaya penanganan bencana	4. Penguatan sistem penyediaan peralatan pendukung serta peningkatan kapasitas pengelolaan gudang dan distribusi logistik	
		5. Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana	5. Membangun sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Strategi dan arah kebijakan merupakan turunan dari tujuan dan sasaran pembangunan BPBD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan/atau Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Beberapa strategi yang akan dilaksanakan BPBD Kota Blitar sepanjang tahun 2025-2029 yang tercakup dalam Program Penanggulangan bencana terdiri dari Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim; Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui penyediaan sistem peringatan dini; Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam upaya perencanaan dan penyusunan regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana; Peningkatan Peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dalam upaya penanganan bencana; Peningkatan sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana. Sedangkan yang tercakup dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan.

Sementara arah kebijakannya terdiri atas: Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya penanggulangan bencana; Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (EWS) di Kawasan rawan bencana; Penguatan sinergitas multisektoral dalam menyusun regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana; Penguatan sistem penyediaan peralatan pendukung serta peningkatan kapasitas pengelolaan gudang dan distribusi logistik; Membangun sistem database berbasis teknologi digital dalam penanggulangan bencana; serta Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku; Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pemenuhan Pelayanan informasi rawan bencana kepada warga negara di kawasan rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi KIE	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100 %	100	52*)	52	53
2	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana meliputi pelatihan, gladi / simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100 %	100	58*)	58	58
3	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan nyawa manusia yang terancam atau terkena dampak bencana serta memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan lanjutan.	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga yang menjadi korban bencana x 100 %	100	100*)	100	100

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen tertulis yang berisi informasi, rencana, strategi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan manajemen bencana. Dengan adanya dokumen kebencanaan yang baik, diharapkan dampak negatif dari bencana dapat diminimalkan, dan upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Adapun dokumen kebencanaan dimaksud terdiri dari : KRB, RPB, RPKB, Rencana Kontijensi, R3P	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun N : Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun N x 100 %	-	100*)	100	100
5	Persentase penanganan pra bencana	Segala upaya dan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.	Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun N : Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun N x 100 %	100	100*)	100	100

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
		Penanganan pra bencana dimaksud meliputi : Sosialisasi, Pelatihan, gladi / simulasi					
6	Persentase penanganan pasca bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak, termasuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi	Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun N : Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P x 100%	-	-	100	100
7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya kesiapsiagaan bencana sehingga diharapkan dapat mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana	Jumlah unit penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di kabupaten/kota pada tahun N : Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun N x 100 %	100	100*)	100	100

*) Realisasi Tahun 2025 merupakan Proyeksi/ Angka Perkiraan

3.5 Program dan Kegiatan

Berikut disajikan sejumlah rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 yang didasarkan pada sejumlah dokumen perencanaan, dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, sejumlah program, kegiatan dan sub-kegiatan tersebut berlandaskan pada prioritas nasional, prioritas provinsi, prioritas daerah, SPM Sub Urusan Bencana, di samping kegiatan dan sub-kegiatan rutin. Adapun Program pada Renja tahun 2026 berjumlah 2, kegiatan berjumlah 12, Sub kegiatan berjumlah 45 dengan total kebutuhan anggaran sejumlah Rp. 4.426.325.606,00

Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan tersebut dapat disimak melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Daftar Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
(1)					(2)	(3)	(4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah berita acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Mendukung Pencapaian TUSI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	01	2.01	0011	Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis Pembangunan	Jumlah berita acara hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Mendukung Pencapaian TUSI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Mendukung Pencapaian TUSI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	
						Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
						Persentase Penangan Pascabencana	
1	05	03	2.01		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Mendukung SPM
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
1	05	03	2.02	0018	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) kabupaten/kota	Mendukung SPM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	03	2.02	0020	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana kontijensi kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Mendukung SPM
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Mendukung SPM
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Mendukung SPM
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Mendukung SPM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
1	05	03	2.03	0002	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Mendukung SPM
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Mendukung SPM
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Mendukung SPM
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar	
1	05	03	2.04	0003	Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Mendukung Pencapaian TUSI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Keterangan
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	Mendukung Pencapaian TUSI
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Mendukung Pencapaian TUSI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BLITAR

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun untuk mendukung pencapaian visi Walikota Blitar dan program prioritas nasional. Selain untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sebagai catatan, prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung SPM sebagai berikut:

- (1) Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota;
- (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sementara, tindak lanjut LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024 diuraikan pada tabel 4.1. Secara garis besar, tindak lanjutnya sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
- (2) Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP terutama membudayakan monev kinerja berjenjang.

Dan rencana kerja program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 secara lengkap disajikan dalam tabel 4.2. Secara garis besar, pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp **4.426.325.606,00**; dan prakiraan maju tahun 2027 sebesar Rp **4.672.178.390,00**.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	1. Pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD namun belum ditetapkan, sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut pada tahun 2026 ke Bagian Hukum 2. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2026 3. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator	- Program penanggulangan Bencana - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
2.	Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP terutama membudayakan monev kinerja berjenjang	1. Mereviu kembali dokumen perencanaan 2. Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan
		diharapkan serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja 3. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.426.325.606,00				4.672.178.390
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.426.325.606,00				4.672.178.390
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.426.325.606,00				4.672.178.390
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku		100%	3.492.665.606,00			100%	3.675.770.390
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	14.560.000,00			100%	14.941.500
1.05.01.2.01. 0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Dokumen	2.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	2.149.875
1.05.01.2.01. 0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	20 Laporan	3.535.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Laporan	3.711.750

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.01. 0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Data	1.190.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Data	1.249.500
1.05.01.2.01. 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah berita acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Berita Acara	3.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	3.696.000,00
1.05.01.2.01. 0011	Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	13 Dokumen	2.785.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	2.884.875,00
1.05.01.2.01. 0013	Sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis Pembangunan	Jumlah berita acara hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Berita Acara	1.190.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	1.249.500,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	2.295.252.958,00			100%	2.410.015.605,00
1.05.01.2.02. 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	204 Orang/ bulan	2.293.020.358,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Orang/ bulan	2.407.671.375,00
1.05.01.2.02. 0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	18 Laporan	2.232.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.344.230,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100%	2.083.800,00			100%	2.187.990,00
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	4 Laporan	2.083.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	2.187.990,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	115.493.310,00			100%	103.950.000,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Paket	30.865.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	25.200.000,00
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	140 Orang	84.627.510,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140 Orang	78.750.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar		100%	178.733.138,00			100%	211.828.415,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Paket	8.336.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.450.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Paket	27.825.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	28.896.420,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Paket	8.765.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.450.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06. 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Paket	21.789.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	28.350.000,00
1.05.01.2.06. 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Paket	11.097.238,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	28.252.085,00
1.05.01.2.06. 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	12 Dokumen	2.754.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	3.885.000,00
1.05.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	30 Laporan	94.602.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Laporan	99.750.000,00
1.05.01.2.06. 0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Dokumen	3.563.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	3.794.910,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	54.418.800,00			100%	46.814.775,00
1.05.01.2.07. 0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	17 unit	14.585.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.314.775,00
1.05.01.2.07. 0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	5 Unit	39.833.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	31.500.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	631.372.000,00			100%	635.310.375,00
1.05.01.2.08. 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	36 Laporan	70.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	73.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.08. 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	13 Laporan	561.372.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	561.810.375,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100%	200.751.600,00			100%	250.721.730,00
1.05.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	5 unit	23.782.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			24.971.730,00
1.05.01.2.09. 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	6 Unit	110.186.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	147.000.000,00
1.05.01.2.09. 0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	18 Unit	6.783.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Unit	15.750.000,00
1.05.01.2.09. 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	39 Unit	19.998.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit	21.000.000,00
1.05.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Unit	40.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	42.000.000,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		80%	933.660.000,00			80%	996.408.00,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana		100%				100%	
		Persentase penanganan pascabencana		100%				100%	
1.05.03.2.01	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		52%	125.013.400,00			100%	131.250.000,00
1.05.03.2.01. 0007	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	600 Orang	125.013.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		900 Orang	131.250.000,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		58%	427.424.700,00			100%	446.208.000,00
1.05.03.2.02. 0018	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) kabupaten/kota	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	100 Orang	45.068.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	73.458.000,00
1.05.03.2.02. 0020	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan- kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	21 Kawasan	77.981.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Kawasan	81.900.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	27 Orang	14.686.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Orang	26.250.000,00
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana kontijensi kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	63.000.000,00
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	12 Laporan	77.688.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	57.750.000,00
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	105.000.000,00
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Kawasan	36.999.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Kawasan	38.850.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	205.347.000,00			100%	246.750.000,00
1.05.03.2.03. 0002	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Dokumen	8.581.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	52.500.000,00
1.05.03.2.03. 0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	50 Orang	55.097.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	31.500.000,00
1.05.03.2.03. 0007	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Dokumen	14.824.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	31.500.000,00
1.05.03.2.03. 0008	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	25 Orang	59.367.150,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	78.750.000,00
1.05.03.2.03. 0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	50 Orang	67.477.550,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	52.500.000,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen R3P yang tersedia sesuai standar		100%	175.874.900,00			100%	172.200.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.04. 0003	Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Dokumen	35.005.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	36.750.000,00
1.05.03.2.04. 0004	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Dokumen	37.539.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	30.450.000,00
1.05.03.2.04. 0005	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	4 Laporan	20.756.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	21.000.000,00
1.05.03.2.04. 0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	2 Kegiatan	7.574.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Kegiatan	21.000.000,00
1.05.03.2.04. 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, semua kecamatan, semua kelurahan/desa	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	63.000.000,00
JUMLAH					4.426.325.606,00	JUMLAH			4.672.178.390,00

BAB V

PENUTUP

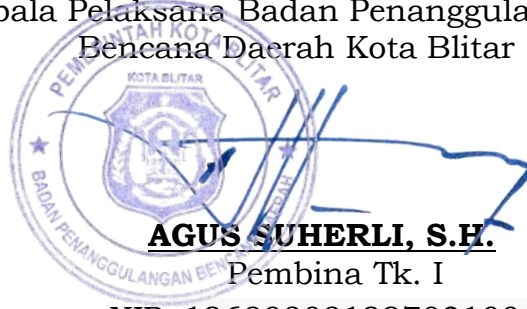
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2026 telah disusun dalam dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan acuan yang ada dan mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi.

Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun ke depan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya ditujukan untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2026.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 berpedoman pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.
5. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
6. Renja selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Blitar, Juli 2025

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar


AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 196808081997031006